

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: TULISAN DI MEDIA MASSA**

Judul Karya Ilmiah (paper) : Antagonisme Demokrasi
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Status Pengusul : Penulis Utama / penulis ke.... / Penulis Korespondensi **

Identitas Prosiding
 a. Judul Prosiding :
 b. Nomor ISSN / ISBN :
 c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksana :
 d. Penerbit / Organiser :
 e. Alamat Repository PT/ Web Prosiding :
 f. Terindeks di (jika ada) -

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional

(beri tanda \checkmark pada kategori yang tepat) Media Nasional

Hasil Penelitian Peer Review:

No	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Prosiding		Nilai Akhir yang Diperoleh (NA)
		Internasional	Nasional	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur isi paper (10)%			
b	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (30%)			
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (30%)			
	Total = (100%)	1		
	Nilai Pengusul (NA X BP ***) = X = 1			

Catatan Penilaian Buku Oleh Reviwer:

Tulisan bagus, di luaran teratas nasional

Padang,
 Reviewer 1/2 **

Prof. Dr. M. S. H. Effendi
 NIP: 19610629 199001 1002
 Unit Kerja: FISIP - UA

Bidang Ilmu: Ilmu Sosial/ Antropologi
 Jabatan/Pangkat:

Pembina Utama Madya/II

* Dinilai oleh dua reviewer secara terpisah

** Coret yang tidak perlu

*** Nasional / Terindeks di DOAJ

**** Bobot Peran (BP): Sendiri = 1; Penulis Pertama= 0,6; Anggota= 0,4 dibagi jumlah anggota

Antagonisme Demokrasi

Indah Adi Putri

Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

Antagonisme demokrasi mengacu pada suatu kondisi di mana pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi (kebebasan, keadilan, dan suara mayoritas) berpengaruh negatif terhadap proses politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Pengaruh negatif itu bisa terlihat dari berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat satu sama lain kepada pemerintah dan munculnya disintegrasi dalam kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini pada akhirnya memudarkan nilai-nilai solidaritas dalam masyarakat.

Belakangan gejala-gejala antagonisme demokrasi tersebut semakin menguat dirasakan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun level pusat. Sinyalemen ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan elite yang cenderung digunakan beberapa kalangan sebagai komoditas politik men-

yang dimilikinya untuk maju, mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Bahwa saat ini praktik pemilihan para elite dalam suatu pemilihan umum ternyata harus dibayar mahal, bahkan sangat mahal (tulah yang harus kita tanggung sebagai bagian bangsa dengan 200 juta lebih penduduk ini), untuk mencapai sebuah keputusan yang dikatakan sebagai kehendak umum (*general will*). Karena hanya dengan kehendak umum-mulah, kedaulatan negara bisa tercapai.

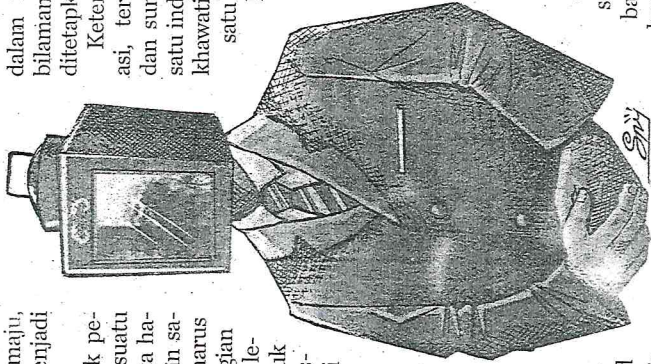
Bukan hal yang sederhana jika mengatakan bahwa apa yang dialami bangsa ini sesungguhnya sudah dialami negara-negara Barat abad ke-17 saat mereka juga tertatih dan terbatu memahami demokrasi sebagai idiom baru dalam kehidupan mereka. Hanya saja, prinsip kebebasan dan kesetaraan tidak dipraktikkan begitu saja.

Prinsip itu juga diikuti dengan kehendak untuk mengubah nasib, keluar dari jerat kondisi ekonomi yang lemah dan

dalam membangun kesetaraan bilamana aturan sudah ada dan ditetapkan.

Keterlibatan politik bervariasi, tergantung pada perilaku dan sumber daya yang dimiliki satu individu. Lebih dengan kekhawatiran tentang sejauh mana satu individu bisa mengubah keputusannya yang akan mengatur hidupnya, akses ke informasi, kemampuan dan kemauan untuk membayarkan biaya, waktu dan partisipasi, serta pengalaman organisasi sosial. Sikap-sikap ini dapat dipengaruhi oleh sistem politik itu sendiri. Seperti harapan banyak teori demokrasi, kemampuan berpartisipasi linear dengan pengalaman dalam sistem politik. Pada saat yang sama, sikap yang mendorong untuk berpartisipasi dalam politik, sumber daya material yang diperlukan untuk itu, tidak terdistribusi merata.

Faktanya, setiap orang memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih (kesetaraan



demokrasi, dan merupakan wakil dari kehendak umum masyarakat Indonesia akan mewujudkan apa yang menjadi kehendak bersama, dan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Yang mengkhawatirkan sesungguhnya adalah, adakah para pemilik kapital memahami bahwa kekuatan miliknya berasal dari hasil kehendak bersama yang sudah dibuat melalui pemilu? Atau kekhawatiran lainnya, adakah para elite partai politik (yang kurang sibuk tebar pesona) menyadari bahwa pilihannya untuk maju sebagai pemimpin (baik di tingkat lokal maupun nasional) sesungguhnya adalah pilihan berisiko (walau terkesan manis laksana mawar berduri) karena sesungguhnya tuntutan kepada mereka adalah menjadi orang terpercaya sebagai penentu keputusan atas nama kehendak umum.

Atau pertanyaan lain yang lainnya, adakah keinginan mencalonkan diri itu didasari oleh hasrat untuk menyinggikan derajat sebagai individu sekaligus sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang merupakan zamrud khatulistiwa (kalau tak boleh dikatakan sebagai bangsa yang sekuat karena persoalan korupsi)?

Ketidakteksetaraan politik

Lively juga menyatakan bahwa ketidakteksetaraan politik mungkin berkembang dengan alasan perbedaan pendapatan atau